

ANALISIS KINERJA KEUANGAN APBDes HASIL IMPLEMENTASI PROGRAM KERJA PARTISIPATIF MELALUI MUSRENBANG DESA SEKANCING KECAMATAN TIANG PUMPUNG KABUPATEN MERANGIN JAMBI

Abdul Muas¹, Erialdy², Teuku Fajar Shadiq³

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

E-mail Corespondent: teuku.fajarshadiq@unis.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam mendukung pelaksanaan program kerja partisipatif hasil Musrenbang di Desa Sekancing, Kecamatan Tiangpumpung, selama periode 2020–2024. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, dokumentasi, serta analisis data keuangan desa selama lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan desa mengalami fluktuasi dengan peningkatan signifikan pada tahun 2024 mencapai Rp1.551.457.014. Namun, belanja desa juga meningkat, terutama pada 2022, yang menyebabkan defisit anggaran dan SILPA negatif. Pola pengeluaran mengalami pergeseran: dari dominasi belanja barang dan jasa (2020–2021), beralih ke belanja tidak terduga (2022), lalu ke belanja modal (2023–2024), mencerminkan penyesuaian terhadap kebutuhan darurat dan pembangunan infrastruktur jangka panjang. Efisiensi pengeluaran cukup tinggi, terlihat dari beberapa kategori belanja yang terealisasi 100% sesuai anggaran, seperti belanja modal dan honorarium. Di sisi tata kelola, penerapan aplikasi Siskeudes telah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meskipun masih terdapat tantangan dalam inklusi informasi ke seluruh warga. Kendala lainnya mencakup dominasi aktor dalam Musrenbang dan minimnya forum komunikasi inklusif. Implikasi dari temuan ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas perangkat desa, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pengelolaan anggaran yang adaptif untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: APBDes, Partisipasi Masyarakat, Musrenbang, Transparansi
Pemberdayaan Desa

Abstract

This study aims to analyze the financial performance of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in supporting the implementation of participatory work programs resulting from the Musrenbang in Sekancing Village, Tiangpumpung Subdistrict, during the period 2020–2024. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through in-depth interviews, documentation, and analysis of village financial reports over the past five years. The findings reveal that village revenue experienced fluctuations, with a significant increase in 2024 reaching IDR 1,551,457,014. However, village expenditure also rose, particularly in 2022, leading to a budget deficit and negative SILPA (remaining budget balance). Expenditure patterns shifted over time: from the dominance of goods and services

spending (2020–2021), to unexpected expenditure (2022), and finally to capital expenditure (2023–2024), reflecting adjustments to emergency needs and long-term infrastructure development. Spending efficiency was relatively high, as evidenced by several categories – such as capital expenditure and honoraria – achieving 100% realization against the budget. In terms of governance, the implementation of the Siskeudes application has improved transparency and accountability, though challenges remain in ensuring inclusive information access for all residents. Other obstacles include the dominance of certain actors in Musrenbang decision-making and the lack of inclusive communication forums. These findings underscore the importance of strengthening the capacity of village apparatus, enhancing community participation, and adopting adaptive budget management to achieve participatory, transparent, and sustainable village financial governance.

Keywords: APBDes, Community Participation, Musrenbang, Transparency, Village Empowerment

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan otonomi yang lebih besar kepada desa untuk mengelola sumber daya dan melaksanakan pembangunan secara mandiri. Instrumen kunci dalam tata kelola ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang menjadi pedoman utama dalam pengalokasian dana untuk lima bidang utama pembangunan, yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan, dan penanggulangan bencana. APBDes tidak hanya dilihat dari aspek teknis finansial, tetapi juga dari aspek tata kelola, khususnya partisipasi masyarakat.

Mekanisme formal untuk memastikan program kerja APBDes mencerminkan kebutuhan riil warga adalah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang). Partisipasi aktif dalam Musrenbang dianggap vital untuk mewujudkan akuntabilitas dan efektivitas pembangunan, di mana masyarakat ditempatkan sebagai subjek, bukan hanya objek pembangunan. Kinerja keuangan APBDes yang baik, yang mencakup efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan, harus sejalan dengan kualitas implementasi program yang lahir dari semangat partisipatif tersebut.

Desa Sekancing, Kecamatan Tiang Pumpung, Kabupaten Merangin, telah mengimplementasikan APBDes hasil Musrenbang dengan alokasi dana yang signifikan (Rp1,2 miliar hingga Rp1,5 miliar) selama periode 2020-2024. Meskipun secara administrasi pengelolaan keuangan telah dibantu oleh aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), dinamika kondisi ekonomi dan kebutuhan sosial (termasuk penyesuaian selama masa pandemi dan pasca-pandemi) menimbulkan fluktuasi dalam realisasi anggaran. Belum adanya analisis komprehensif yang mengaitkan kinerja keuangan APBDes (aspek finansial) dengan tingkat implementasi program kerja partisipatif hasil Musrenbang (aspek tata kelola) secara mendalam, memunculkan kebutuhan untuk mengkaji sejauh mana APBDes di Desa Sekancing telah dikelola secara efektif, transparan, dan akuntabel dalam konteks pemberdayaan masyarakat.

Fokus Penelitian dan Analisis Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan APBDes Desa Sekancing diukur melalui efektivitas dan efisiensi anggaran selama periode 2020–2024?
2. Sejauh mana program kerja yang dilaksanakan bersumber dari hasil Musrenbang dan bagaimana dampaknya terhadap implementasi APBDes di Desa Sekancing?
3. Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Sekancing dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengelolaan keuangan APBDes?

Tujuan dan Ruang Lingkup Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan APBDes Desa Sekancing, termasuk efektivitas dan efisiensi pengeluaran selama periode 2020–2024.
2. Mengkaji korelasi antara program kerja hasil Musrenbang dengan realisasi APBDes, serta menganalisis relevansi program tersebut dengan kebutuhan masyarakat.
3. Mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penguatan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif di Desa Sekancing.

Kajian Literatur

Kajian literatur dalam penelitian ini berfokus pada tiga konsep utama yang saling terkait, didukung oleh temuan dari jurnal-jurnal terkini (primer dan mutakhir).

1. Kinerja Keuangan APBDes: Kinerja keuangan pemerintah desa diukur menggunakan indikator seperti rasio efektivitas (perbandingan realisasi pendapatan terhadap target), rasio efisiensi (perbandingan realisasi belanja terhadap anggaran), dan akuntabilitas (kepatuhan terhadap peraturan dan pelaporan). Penelitian sebelumnya oleh Pradani (2020) dan Wahidah et al. (2022) menekankan bahwa pengelolaan Dana Desa yang efektif memerlukan integrasi antara perencanaan dan pelaporan yang baik.
2. Perencanaan Partisipatif dan Musrenbang: Konsep ini berakar pada prinsip *good village governance*, di mana pengambilan keputusan melibatkan berbagai stakeholder desa. Musrenbang adalah forum formal yang menjamin perencanaan dari bawah (*bottom-up planning*). Penelitian oleh Gulo & Destriana (2018) menunjukkan bahwa partisipasi yang kuat dapat meningkatkan *sense of ownership* masyarakat terhadap program pembangunan, yang pada akhirnya meningkatkan keberlanjutan dan keberhasilan program.
3. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi, terutama laporan keuangan, kepada publik. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pemerintah desa atas penggunaan dana publik. Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) oleh pemerintah (Hasliani & Yusuf, 2021) merupakan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas administratif. Namun, diperlukan kajian lebih lanjut terkait transparansi substantif – yaitu kemampuan masyarakat umum untuk memahami dan mengakses informasi tersebut.

B. Metode

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam (holistik dan kontekstual) tentang fenomena yang diteliti, yaitu kinerja keuangan APBDes Desa Sekancing dalam konteks implementasi program partisipatif hasil Musrenbang. Melalui pendekatan kualitatif, data yang dikumpulkan berupa deskripsi naratif, dokumen, dan transkrip wawancara yang kemudian diinterpretasikan untuk menemukan makna, pola, dan tantangan dalam tata kelola keuangan desa. Penelitian deskriptif ini berupaya untuk menggambarkan, menganalisis, dan menafsirkan kondisi dan praktik yang ada terkait pengelolaan APBDes.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Sekancing, Kecamatan Tiang Pumpung, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada Desa Sekancing yang merupakan objek studi kasus spesifik tesis ini, yang memiliki dinamika dalam pengelolaan APBDes dan implementasi program hasil Musrenbang selama periode analisis 2020-2024. Periode pengumpulan data dan analisis utama dilaksanakan antara November 2024 hingga Maret 2025.

Sumber Data dan Informan

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data utama:

Data Primer: Diperoleh langsung dari informan melalui wawancara. Informan kunci dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* (pemilihan informan berdasarkan keahlian dan pengetahuan yang relevan dengan topik). Informan terdiri dari: Kepala Desa Sekancing, Sekretaris Desa (Sekdes), Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perwakilan Tokoh Masyarakat/Kelompok Masyarakat (misalnya perwakilan dari BUMDes atau tokoh adat/pemuda).

Data Sekunder: Berupa dokumen dan catatan yang mendukung analisis. Data sekunder meliputi Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sekancing periode 2020-2024, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (LRA) 2020-2024, Dokumen hasil Musrenbang Desa, Peraturan Desa (Perdes) dan Peraturan Kepala Desa (Perkades) yang relevan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan komprehensif adalah:

1. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*): Dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan kunci untuk menggali pandangan, pengalaman, dan pemahaman mereka mengenai kinerja keuangan, proses Musrenbang, serta tantangan transparansi dan partisipasi.
2. Dokumentasi: Pengumpulan data dari dokumen resmi desa, khususnya APBDes dan LRA periode 2020-2024, untuk mendapatkan data kuantitatif terkait pendapatan, belanja, efektivitas, dan efisiensi anggaran.
3. Observasi Partisipatif (Tidak Penuh): Dilakukan untuk mengamati secara langsung proses tata kelola yang relevan, seperti sosialisasi APBDes atau pelaksanaan program

kerja di lapangan (jika memungkinkan pada saat penelitian), guna memverifikasi informasi yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi.

Teknik Validitas Data (Uji Kredibilitas)

Untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas temuan penelitian, digunakan teknik Triangulasi Sumber Data. Triangulasi ini dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek informasi yang diperoleh dari berbagai sumber berbeda (misalnya, membandingkan data LRA dari dokumen resmi dengan informasi yang disampaikan oleh Kaur Keuangan dan pandangan BPD tentang realisasi program). Tujuannya adalah untuk mengeliminasi bias dan memperkuat konsistensi temuan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep Miles dan Huberman (1994) yang meliputi tiga alur kegiatan yang dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*): Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan (hasil wawancara dan observasi). Data yang direduksi difokuskan pada tiga rumusan masalah utama: kinerja keuangan, relevansi program Musrenbang, dan aspek tata kelola.
2. Penyajian Data (*Data Display*): Sekumpulan informasi tersusun yang memungkinkan penarikan kesimpulan. Data disajikan dalam bentuk narasi, matriks, atau tabel sederhana untuk melihat hubungan antar variabel. Dalam penelitian ini, data kuantitatif dari APBDes disajikan dalam bentuk tabel kinerja (efektivitas dan efisiensi) untuk diinterpretasikan secara kualitatif.
3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*): Penarikan kesimpulan awal yang kemudian diverifikasi dan divalidasi dengan temuan lapangan dan kajian literatur. Kesimpulan akhir akan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

C. Hasil dan Pembahasan

Kinerja Keuangan APBDes (2020-2024) dan Pola Pengeluaran

Kinerja keuangan Desa Sekancing menunjukkan dinamika yang signifikan. Pendapatan desa menunjukkan fluktuasi, namun mencapai peningkatan signifikan pada tahun 2024. Belanja desa juga meningkat, khususnya pada tahun 2022, yang mengakibatkan defisit anggaran dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SLIPA) menjadi negatif. Pola pengeluaran mengalami pergeseran yang mencerminkan adaptasi pemerintah desa terhadap kondisi dan kebutuhan:

1. 2020-2021: Dominasi belanja barang dan jasa.
2. 2022: Beralih ke belanja tidak terduga, yang merefleksikan penyesuaian terhadap kebutuhan darurat.
3. 2023-2024: Fokus pada belanja modal, yang menunjukkan pergeseran prioritas ke pembangunan infrastruktur jangka panjang.

Secara umum, efisiensi pengeluaran desa Sekancing relatif tinggi, dengan realisasi beberapa kategori belanja seperti belanja modal dan honorarium mencapai 100% dari anggaran.

Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Publik

Secara administratif, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes

sudah berjalan cukup baik melalui penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan pelaporan resmi. Namun, tantangan utama terletak pada transparansi substantif bagi masyarakat umum.

Tabel 1. Rencana Anggaran Dana dan Realisasi Desa Sekancing Tahun 2020-2024

Tahun	Pendapatan Total (Rp)	Belanja Total (Rp)	SILPA Akhir Tahun (Rp)
2020	1.430.438.734	1.429.905.000	533.734
2021	1.239.858.224	1.088.069.567	10.915.952
2022	1.430.527.971	1.443.719.569	(1.334.841)
2023	1.243.260.146	1.262.829.787	323.897
2024	1.340.604.595	1.405.885.893	329.572

Laporan keuangan seringkali disajikan dalam format teknis dan bahasa formal yang sulit dipahami oleh warga yang tidak memiliki latar belakang keuangan. Hal ini membatasi kemampuan masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana secara efektif, karena informasi yang tersedia tidak sepenuhnya dapat diakses secara pemahaman oleh seluruh warga. Strategi keterbukaan informasi harus memastikan setiap warga merasa dilibatkan dan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pengelolaan keuangan desa.

Di sisi partisipasi, Musrenbang merupakan saluran aspirasi formal. Namun, terdapat kendala seperti dominasi aktor tertentu dalam pengambilan keputusan dan minimnya forum komunikasi inklusif di luar Musrenbang formal. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan program tidak sepenuhnya merata antar wilayah. Terdapat juga masalah terkait kesadaran individu, di mana beberapa warga enggan menyampaikan usulan karena merasa tidak akan diakomodasi.

Tabel 2. Pengeluaran Paling Efisien Tahun 2020-2024

Tahun	Kategori Pengeluaran Efisien	Realisasi vs Anggaran	Efisiensi (%)	Catatan Efisiensi
2020	Belanja Modal	361.105.000 dari 361.105.000	100%	Realisasi tepat sesuai anggaran
2021	Belanja Honorarium	255.810.000 dari 255.810.000	100%	Realisasi penuh, tanpa selisih
2022	Belanja Perjalanan Dinas	13.600.000 dari 13.600.000	100%	Efektif dan tepat sasaran
2023	Belanja Barang dan Jasa yang	34.400.000 dari 34.400.000	100%	Menunjukkan langsung bermanfaat

	Diserahkan ke Masyarakat			
2024	Belanja Modal Jalan/Prasarana	225.000.000 dari 225.000.000	100%	Pembangunan fisik berjalan maksimal

Rekomendasi Strategis Peningkatan Kinerja

Untuk mengatasi tantangan transparansi, pemerintah desa perlu menyederhanakan format laporan, misalnya dengan menggunakan **infografis** yang lebih komunikatif dan intuitif untuk menggambarkan proporsi dan alokasi anggaran. Penyebaran informasi juga harus diperluas melalui media digital (media sosial, grup pesan singkat) dan sosialisasi tatap muka melalui forum dusun atau pertemuan rutin.

Peluang strategis peningkatan kinerja APBDes terletak pada penguatan kapasitas SDM perangkat desa melalui pelatihan teknis, serta pelibatan masyarakat dalam forum Musrenbang maupun diskusi tematik untuk meningkatkan literasi anggaran dan pengawasan.

D. Kesimpulan

1. Kinerja keuangan APBDes Desa Sekancing (2020-2024) menunjukkan dinamika dengan fluktuasi pendapatan dan peningkatan belanja, yang puncaknya pada tahun 2022 menyebabkan defisit dan SILPA negatif. Pergeseran pola belanja menuju belanja modal (2023-2024) mencerminkan adaptasi pemerintah desa terhadap kebutuhan pembangunan infrastruktur jangka panjang.
2. Secara administratif, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes sudah baik dengan penggunaan Siskeudes. Namun, tantangan utama adalah minimnya penyebaran informasi yang inklusif dan mudah dipahami oleh masyarakat luas (transparansi substantif).
3. Dominasi aktor dalam Musrenbang juga menjadi hambatan dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan adil.
4. Untuk mewujudkan tata kelola yang partisipatif dan berkelanjutan, disarankan untuk memperkuat kapasitas SDM perangkat desa melalui pelatihan teknis, meningkatkan literasi anggaran masyarakat, dan mengoptimalkan mekanisme pengawasan berbasis masyarakat melalui sosialisasi tatap muka, pemanfaatan media digital, dan forum diskusi tematik yang inklusif.

Referensi

Jurnal

- Ardiyanti, A., & Supriandi, Y. N. (2018). Efektivitas Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Terhadap Implementasi Good Governance Serta Implikasinya Pada Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Tanggerang. *Jurnal Akutansi Manajerial*, 3(1), 1-20.
- Ariadi, A. (2019). Perencanaan pembangunan desa. *Meraja Journal*, 2(2), 135-147.

- Arina, A. I. S., Masinambow, V. A. J., & Walewangko, E. N. (2021). Pengaruh dana desa dan alokasi dana desa terhadap indeks desa membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(3), 22–41.
- Bawono, I. R. (2019). Optimalisasi potensi desa di Indonesia. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Damanik, S. E. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Kawasan Hutan. *Uwais Inspirasi Indonesia*.
- Dhue, J. I. R., & Tokan, F. B. (2021). Penguatan Kapasitas Pemerintah Merencanakan Pembangunan Desa, Di Desa Oben Kabupaten Kupang. *Warta Governare: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 335–356.
- Erialdy, E. (2024). The Relationship Between Recruitment And Human Resources Professionalism In The Manufacturing Company Segment. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 13140-13146.
- Fahmi, A., Kusmardani, C., & Erialdy, E. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Seleksi Sumber Daya Manusia terhadap Pengembangan Strategi Seleksi Yang Efektif. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(4), 2045-2051.
- Ginda, G. (2020). Optimalisasi Koperasi sebagai Instrumen Pemberdayaan masyarakat desa. *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam Dan Pengembangan Masyarakat*, 5(2), 40–68.
- Giroth, I. G., Kasenda, V., & Pangemanan, F. N. (2022). Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2020 di Desa Maluku Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan.
- Governance, 2(1). Gulo, Y., & Destriana, N. (2018). Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan Berbasis Partisipasi Warga Menuju Peningkatan dan Kemandirian Pengelolaan Ekonomi di Desa Parakanlima, Cirinten, Lebak-Banten. *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)*, 1, 1620–1628.
- Haliim, W. (2020). Kebijakan pembangunan dalam konsep kepemimpinan partisipatif. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 15(1), 91–104.
- Hasliani, M. Y., & Yusuf, M. (2021). Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa. *YUME: Journal of Management*, 4(1).
- Huzaeni, M. R., & Anwar, W. R. (2021). Pelaksanaan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Dialektika Hukum*, 3(2), 213–230.
- Irawan, E. (2020). Pembangunan Pedesaan Melalui Pendekatan Kebijakan Local Economic Development Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Desa. *Nusantara Journal of Economics*, 2(02), 38–52.
- Juhri, J., & Mulyadi, E. (2023). Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Dana Hibah Keagamaan Di Kota Tangerang (Studi Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Administrasi, 5(2), 66-76. Kota Tangerang). *Perspektif: Jurnal Ilmu*
- Kusnadi, R., Eliadi, D., Darmojo, H. S., & Mulyadi, E. (2024). Pengaruh Kepemimpinan Camat Kelengkapan Sarana Dan Komunikasi Organisasi Terhadap Efektivitas

- Pelayanan Publik Di Kecamatan Pinang Kota Tangerang. *Perspektif: Jurnal Ilmu Administrasi*, 6(2), 1-11.
- Kusnadi, I. H. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Subang. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 8(1), 30-57.
- Kusumastuti, N. (2018). Strategi mempercepat pembangunan desa mandiri: studi di Desa Kemadang Gunungkidul. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 2(1), 177-198.
- Latupeirissa, J. J. P. (2024). Transformasi Digital Dan Dampaknya Terhadap Perencanaan Pembangunan Di Era Milenial. *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 11(2), 204-209.
- Manembu, A. E. (2018). Peranan perempuan dalam pembangunan masyarakat desa (suatu studi di desa Maumbi kecamatan Kalawat kabupaten Minahasa Utara). *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 7(1).
- Manghayu, A. (2018a). Perencanaan pembangunan partisipatif dalam penerapan e musrenbang. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 5(2), 95-115.
- Manghayu, A. (2018b). Perencanaan pembangunan partisipatif dalam penerapan e musrenbang. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 5(2), 95-115.
- Miranti, M., & Sekarina, L. (2022). Penerapan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Stbm) Untuk Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Desa Suka Maju Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo Tahun 2020. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 4(1), 73-96.
- Mubarok, H. F., & Setyawati, I. E. (2021). Prioritas Anggaran Pada Dana Desa Cisempur Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. *Neo Politea*, 2(2), 50-64.
- Mujab, S., & Irfansyah, A. (2020). Komunikasi Politik Identitas KH Ma'ruf Amin sebagai Strategi Depolarisasi Agama pada Kontestasi Demokrasi Pilpres 2019. *Warta Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 3(01), 54-66.
- Mustanir, A., & Yasin, A. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Transect pada Perencanaan Pembangunan Community Participation in Transect on Development Planning. *Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik*, 8, 137-146.
- Mustanir, A., Yasin, A., Irwan, I., & Rusdi, M. (2019). Potret Irisan Bumi Desa Tonrong Rijang Dalam Transect Pada Perencanaan Pembangunan Partisipatif. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(4), 1-14.
- Nailufar, F. D., Sijabat, S. G., Saksono, R. N. A., & Taqiyya, A. P. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Pelatihan Perencanaan Pembangunan Inklusif Bagi Kepala Desa di Kabupaten Purwakarta. *UN PENMAS (Jurnal Pengabdian Masyarakat Untuk Negeri)*, 4(1), 35-50.
- Oktavioni, D., Mulyadi, E., & Hardian, D. E. (2024). Implementasi Pengembangan Aparatur Melalui Learning Management System Di Kota Tangerang (Studi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Tangerang). *Perspektif: Jurnal Ilmu Administrasi*, 6(1), 35-42.

- Pradani, R. F. E. (2020). Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berbasis Potensi Lokal Sebagai Penggerak Ekonomi Desa. *Journal of Economics and Policy Studies*, 1(1), 23–33.
- Purnamasari, H., & Ramdani, R. (2018). Manajemen Pemerintahan dalam Pembangunan Desa di Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 3(1), 1.
- Putra, C. A., Rosida, D. F., Widodo, M. R., & Alhisyam, A. B. (2024). Pemberdayaan Kelompok Rentan di Desa Oenoni Kecamatan Amarasi Nusa Tenggara Timur dengan Mengimplementasikan Rancangan Rumah K Poinoni. *Kolaborasi: Jurnal Hasil Kegiatan Kolaborasi Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 69–81.
- Rachmawatie, S. J., & Pamujiasih, T. (2022). Pembangunan Desa Berbasis Sumber Daya Manusia Dan Kewirausahaan. *Gema*, 34(01), 52–58.
- Rahayu, S. (2019). Pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser. *Jurnal Artikel Ilmu Pemerintahan*.
- Ray, F. (2020). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Hoku-Hoku Gam Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(94).
- Ridwan, R., & Putri, I. M. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perumusan Perencanaan Pembangunan Di Desa Sepakat Bersatu Tahun 2019. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 4(1), 119–137.
- Safira, E. (2022). Pemanfaatan E-Musrenbang Dalam Meningkatkan Efektivitas Perencanaan Pembangunan Daerah Di Tingkat Kelurahan Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial Dan Politik*, 2(3), 1–12.
- Salim, K. A. (2020). Implementasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan di Desa landau APIN Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau. *Perahu (Penerangan Hukum): Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2).
- Saputra, I., Erialdy, E., & Eliadi, D. (2023). Pengaruh Pemenuhan Character Building, Motivasi Belajar Dan Kebiasaan Belajar Terhadap Peningkatan Mutu Taruna Poltekel Banten. *Perspektif: Jurnal Ilmu Administrasi*, 5(1), 59–65.
- Sari, N. I., & Majid, J. (2021). Peran Whistleblower Dalam Pengelolaan Dana Desa Upaya Mewujudkan Good Village Governance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 7(2).
- Sarjito, A. (2023). Dampak digitalisasi administrasi perdesaan di negara berkembang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 13(2), 106–124.
- Setiawan, A., Suwaryo, U., & Rahmatunnisa, M. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Bandung. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik*, 3(02), 251–270.
- Simbolon, B. R., & Khairifa, F. (2018). Strategi Komunikasi pemerintahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan desa wisata Tuktuk Siadong Kabupaten Samosir. *Jurnal Darma Agung*, 26(3), 606–619.
- Sulistiwani, A., Ispriyoso, B., & Ristiyawati, A. (2019). Bentuk dan mekanisme perencanaan keuangan daerah yang partisipatif guna mewujudkan akuntabilitas publik. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 146–157.

- Suparman, N. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(1), 31–42.
- Syahrial, S. (2020). Dampak COVID-19 terhadap tenaga kerja di Indonesia. *Jurnal Ners*, 4(2), 21–29.
- Trisnawarnman, D., & Rusdi, Z. (2018). Desain Dashboard Untuk Pendukung Sistem Cerdas Analisis Kesesuaian Kebutuhan dan Ketersediaan Sumberdaya Pembangunan Desa Mandiri. *Computatio: Journal of Computer Science and Information Systems*, 2(1), 14–22.
- Wahidah, U., Ayem, S., Ballerina, T., Mujiyanti, S., Abinowo, A. C., Hermawati, A., & Pitna, Y. O. (2022). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Kalurahan Bangunjiwo Kasihan Bantul). *SEIKO: Journal of Management & Business*, 5(2), 637–648.
- Wirsa, I. N. (2020). Keberadaan Bumdes Sebagai Pilar Pertumbuhan Ekonomi Desa Di Desa Telagatawang, Kecamatan Sidemen Karangasem. *PARTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 7–12.
- Yanuarsari, R., Asmadi, I., Muchtar, H. S., & Sulastini, R. (2021). Peran Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam Meningkatkan Kemandirian Desa. *Jurnal Basicedu*, 5(6), 6307–6317.